

Perencanaan Pusaka dan Nilai-nilainya dalam Persepsi Publik

Zya Dyena Meutia¹, Roos Akbar², Denny Zulkaidi³

¹ Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota, SAPPK, Institut Teknologi Bandung.

^{2,3} Perencanaan Wilayah dan Kota, SAPPK, Institut Teknologi Bandung.

Abstrak

Perencanaan pusaka adalah bagian dari perencanaan tata ruang kota karena proses pelestarian lanskap bersejarah seharusnya akan berpengaruh terhadap keseluruhan bentuk ruang kota mengingat objek yang dilestarikan tersebut umumnya merupakan objek vital suatu kota. Tujuan penelitian ini adalah pemikiran komponen nilai-nilai dalam perencanaan pusaka terutama nilai memori yang membangkitkan nilai-nilai dalam masyarakat dengan memperlakukan pusaka sebagai sebuah proses mengingat dan mengubah gaya hidup menjadi lebih baik lagi serta menanggapi perubahan struktur kota sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses sosial dan budaya. Penelitian ini memakai paradigma konstruktivis dengan pendekatan interpretatif karena berupaya mengkonstruksikan keberadaan nilai-nilai signifikan kultural dalam persepsi publik memandang sebuah kawasan sebagai pusaka dengan mengambil kasus di beberapa kawasan yang terkena dampak bencana tsunami 2004 di Banda Aceh seperti kawasan kapal PLTD Apung dan sekitarnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa survei online dan juga wawancara karena nilai-nilai signifikan kultural merupakan sebuah konstruksi sosial sehingga dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam.

Kata-kunci : perencanaan, pusaka, nilai-nilai, persepsi publik, pasca bencana

Heritage Planning and the Values in Public Perception

Abstract

Heritage planning is a part of urban spatial planning since the process historic preservation landscape should be influential in the form the city remember the object preserved is generally vital objects a city. The purpose of this research is re-thought components values in heritage planning especially value memory that arouses values in society by treating heritage as the process of remembering and changing life style be even better and response to the city as an integral part of the process of social and cultural. This research use paradigm constructivism with the approach interpretative because trying to construction the existence of significant cultural values in public perceptions looking at an area as heritage by taking cases in several areas affected by the impact of disasters 2004 tsunami in Banda Aceh suc as area a ship PLTD Apung and its surrounding. The qualitative method was used in the study in the form of the survey online and also interview because significant cultural values is a social construction, so it needs a profound understanding.

Keywords : *planning, heritage, values, public perception, post disaster*

Kontak Penulis

Zya Dyena Meutia

Perencanaan Wilayah dan Kota, SAPPK, Institut Teknologi Bandung. Jl. Ganesha. No.10, Kota Bandung, Jawa Barat, Kode pos 40132, Tel : +62-22- 504625 Fax : +62-22-2504625

E-mail : dyenameutia@gmail.com

Informasi Artikel

Diterima editor tanggal 11 Oktober 2018. Revisi tanggal 2 November 2018. Disetujui untuk diterbitkan tanggal 18 Juni 2018

ISSN 2301-9247 | E-ISSN 2622-0954 | <https://jlbi.iplbi.or.id/> | © Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI)

Pendahuluan

Dalam teori perencanaan, konsep pusaka perkotaan dapat diasosiasikan dengan pendekatan berbasis arsitektur (*architectural based approach*), yang merupakan salah satu dari tiga akar perencanaan (Healey, 1997). Pada awal perkembangannya, merencanakan atau mengelola pusaka perkotaan terkait dengan konservasi bahan atau material bangunan, memperkuat struktur agar durabilitas bangunan terjaga. Fokus konservasi terhadap bangunan ini bergeser pada perencanaan dalam lingkup kawasan yang fokus pada proses seleksi dan prioritas kawasan atau kota bersejarah (*historical based approach*) (Ashworth, 1991; Tunbridge & Ashworth, 1994; Graham, et al., 2004). Tantangan dalam pengelolaan pusaka perkotaan di masa mendatang tidak hanya bersumber dari bangunan bersejarah saja tetapi nilai-nilai yang terkait dengan masyarakat di sekitarnya. Avrami, et al. (2000) menjelaskan tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam mengelola pusaka, termasuk pusaka perkotaan, salah satunya adalah nilai-nilai penting dalam masyarakat. Persoalan terkait dengan nilai-nilai pusaka antara lain: Mengapa suatu objek atau tempat dianggap penting? Untuk siapa konservasi dilakukan? Sejauh mana dampak dari intervensi (misalnya kegiatan pariwisata, perubahan tata guna lahan)? dan bagaimana hal tersebut dipahami masyarakat.

Pengelolaan pusaka perkotaan erat kaitannya dengan prinsip preservasi lingkungan bersejarah (*historic preservation*) dan konservasi perkotaan (*urban conservation*). Dalam perkembangannya, terjadi pergeseran dari pendekatan konservasi bangunan ke perencanaan pusaka (*heritage planning*). Perencanaan pusaka memberi ruang dinamis bagi definisi konservasi, yang diartikan sebagai kegiatan pelestarian sekaligus pemanfaatan. Dalam konsep perencanaan pusaka, obyek yang dikonservasi bukan saja bangunan tunggal tetapi bagian atau area perkotaan sebagai unit yang formal dan fungsional (Ashworth, 1991). Perencanaan pusaka, secara rinci mencoba mempertautkan lingkungan binaan sebagai bentuk perkotaan (*urban form*), fungsi kawasan, dan revitalisasi perkotaan (Ashworth, 1991; Graham, et al., 2004).

Terkait dengan pendekatan nilai (*Value based approach*) terhadap manajemen pusaka perkotaan didasarkan pada premis dasar bahwa untuk mengelola struktur atau tempat tertentu, hal pertama yang penting adalah mengidentifikasi mengapa tempat tersebut menjadi penting sebagai pusaka (Worthing and Bond, 2007). Pendekatan nilai-nilai signifikansi budaya diadakan untuk menjadi proses yang lebih demokratis dan komprehensif karena memfasilitasi masukan yang lebih besar dari jangkauan yang lebih luas (Jameson, 2008). Sementara pendekatan manajemen tradisional pusaka (*Value based approach dan historical based approach*) sebaliknya dianggap sebagai pelestarian dari para ahli dan kaum elit yang lebih fokus melestarikan rautan fisik kota seperti bangunan, monumen dan bentuk-bentuk fisik lainnya yang terjaga autentisitas dan integritas tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang melekat didalamnya (de la Torre, 2005).

Signifikansi budaya atau dikenal dengan *cultural significance* merupakan sebuah pernyataan tentang mengapa sebuah objek lanskap budaya (bangunan, struktur dan tempat) menjadi penting untuk dilestarikan (Worthing and Bond, 2007). Dari pengalaman empiris dan diskursus yang berkembang selama ini, penetapan signifikansi dilakukan melalui penelusuran terhadap nilai-nilai keunggulan yang terkandung. Penelusuran tersebut lazimnya ditentukan oleh nilai historis, estetika, ilmiah sosial dan spiritual (Burra Charter, 1999; Demas, 2002). Dari hasil penelusuran tersebut disusun sebuah pernyataan eksplisit tentang nilai dan kepentingannya untuk dilestarikan, dan pengungkapan fenomena masa lalu, menjelaskan relevansinya dengan masa kini, serta kegunaannya untuk pemahaman pada masa depan. Pendekatan berbasis nilai juga diatribusikan dengan memiliki kapasitas untuk memperbaiki keterlibatan masyarakat dalam praktik pelestarian modern (Mason, 2006). Etos yang mendukung argumen tersebut akan tampak sangat konsisten dengan praktik perencanaan kolaboratif saat ini, khususnya dalam kasus yang dibuat untuk kerangka kerja pengambilan keputusan yang lebih inklusif (Healey, 2003). Fokus terhadap nilai-nilai signifikan pusaka pada manajemen pelestarian pusaka perkotaan mendukung relevansinya terhadap teori dan praktek perencanaan. Meningkatnya nilai-nilai yang muncul pada suatu kawasan karena pendekatan berbasis nilai dalam menentukan pusaka telah dijuluki sebagai '*values-centred theory*' (Mason, 2008, 304).

Perencanaan pusaka adalah bagian dari perencanaan tata ruang kota karena proses pelestarian lanskap bersejarah seharusnya akan berpengaruh terhadap keseluruhan bentuk ruang kota mengingat objek yang dilestarikan tersebut umumnya merupakan objek vital suatu kota. Ashworth (1991) menyatakan bahwa perencanaan pusaka perkotaan, didalam konteks tata ruang, tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mengenai fungsi kota itu sendiri, sehingga sebuah kota memiliki beragam lapisan keunggulan yang seharusnya dilestarikan. Menurut Fredholm (2017), kompleksitas yang melekat pada pusaka dalam konteks perencanaan tata ruang masih belum sepenuhnya diakui karena perencana umumnya masih cenderung menganggap aktivitas sebagai masalah teknis yang dapat diselesaikan dengan keputusan-keputusan rasional. Banyak pendekatan dalam perencanaan penataan kota yang jarang mengakomodasi keberagaman struktur sosio-kultural yang telah terbentuk di kawasan karena perencana kota lebih sering melihat kota sebagai benda fisik ketimbang benda budaya yang memiliki nilai-nilai bermakna (Sudikno, 2004). Perencana sebaiknya memusatkan perhatian untuk membangun konsensus sehingga perlu kemampuan dalam mengenali banyaknya sistem nilai yang hadir dalam mediasi waktu dan ruang kota. Kota merupakan wadah aktivitas penduduk yang memiliki nilai sejarah, budaya, sosial dan hal-hal lain yang bersifat kontekstual. Keunikan yang menjadi ciri khas suatu kota tersebut tidak dapat lepas dari perkembangan sejarah, budaya, dan nilai sosial yang ada dalam masyarakat.

Perencanaan tata ruang pada akhirnya merupakan proses yang membentuk sebuah ruang sosial bagi manusia, dimana sebuah tata ruang perkotaan itu sendiri merupakan

suatu hasil dari perubahan konstan dari budaya sosial antar manusia dalam lingkungannya, baik sebelum maupun sesudah adanya perencanaan. Sehingga secara singkat dapat dikatakan bahwa kota adalah sebuah proses berulang (*cyclical*) dari budaya manusia membentuk kota, dan selanjutnya kota itu sendiri akan menghasilkan budaya kembali, baik budaya yang baru atau melanjutkan budaya yang lama sebagai nilai-nilai penting sebuah pusaka (Miles 2007, 75). Banyak aspek dalam membuat keputusan penetapan pusaka perkotaan berada terutama dalam peraturan perencanaan tata guna lahan (Hobson, 2004).

Dalam Perencanaan tata ruang, pembangunan harus dikontrol melalui aktivitas pengendalian pembangunan yang didasarkan atas rencana guna lahan yang merupakan fungsi praktis dari suatu rencana tata ruang. Kaiser, Godschalk dan Chapin (1995) menuliskan bahwa fungsi suatu perencanaan adalah menjadi acuan pemerintah dalam membuat keputusan-keputusan pada fasilitas publik, zoning, peremajaan kota, kontrol pada subdivisi lahan, dan juga untuk menginformasikan pada sektor privat tentang pola pembangunan perkotaan masa depan yang direncanakan. Namun, pada sisi yang lain, perencanaan yang menghasilkan pola keruangan penggunaan lahan yang optimal selalu dipengaruhi oleh keterbatasan lahan dan masalah lingkungan.

Sebagai contoh bahwa tidak jelasnya sistem perencanaan yang dianut di Indonesia mengakibatkan proses pengambilan keputusan dalam menanggapi proposal pembangunan yang kemudian menimbulkan terjadinya konversi guna lahan menjadi tidak jelas rujukannya. Definisi atau pengertian “sesuai dengan tata ruang” menjadi tidak dapat diterjemahkan dengan baik berdasar kedua sistem perencanaan tersebut (Roos, 2012). Penetapan kawasan rawan bencana atau pengaturan dalam peraturan zonasi (misalnya) yang memiliki aset berharga seperti pusaka perkotaan terancam tidak akan lestari seperti kasus kawasan rawan bencana di Banda Aceh yang pernah dilanda tsunami tahun 2004 huniannya kembali dibangun sejajar pantai dimana pemerintah tidak belajar dari bencana yang pernah terjadi dengan membangun di zona yang sama, padahal begitu banyak nilai-nilai berharga akan jejak, tempat dan objek penting yang dapat ditetapkan sebagai kawasan pusaka. Aset-aset berharga kota yang seharusnya dijaga dan dilestarikan sebagai pembelajaran sosial justru hilang dan mungkin saja dilupakan. Kawasan pusaka perkotaan yang seharusnya menjadi bagian dari kawasan lindung menjadi terpinggirkan karena aspek tata ruang yang diabaikan. Sehingga penekanannya adalah seperti apa melestarikan nilai-nilai yang melekat pada suatu tempat menjadi berharga dianggap pusaka dalam persepsi publik dengan melihat aspek memori pada suatu tempat.

Pemahaman akan pendekatan berbasis nilai sangat berpengaruh pada perencanaan tata ruang khususnya pada perencanaan tata guna lahan dan implikasi kebijakannya dalam konteks kawasan pascabencana. Dengan menggunakan pendekatan berbasis nilai seharusnya dapat menentukan kemampuan mereka untuk menghasilkan pembuatan keputusan yang lebih baik dan memberi kontribusi keluaran yang lebih baik untuk perencanaan pusaka (Jameson, 2008; Mason, 2008; Worthing and Bond,

2007; Gibson dan Pendlebury, 2009). Kegunaan dan implikasi dari pendekatan berbasis nilai yang digunakan dapat diaplikasikan pada beragam aset pusaka perkotaan dan lingkungan binaan mulai dari struktur bangunan hingga kawasan bersejarah dengan skala penerapannya mencakup dari tingkat sub regional, regional bahkan nasional (Worthing and Bond, 2007).

Metode Penelitian

Penelitian ini akan membangun pemaknaan empiris dan kebenaran yang ada di lapangan melalui metoda penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif digunakan karena penarikan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus yang selanjutnya menuju pada kesimpulan yang bersifat umum (Marshall dan Rossman, 2014). Penelitian dimulai dari fakta atau pengalaman empiris, dari data atau fakta tersebut, kemudian disusun dan dianalisa sehingga kemudian dapat diambil kesimpulan yang bersifat umum.

Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha memperoleh data, peneliti akan melakukan strategi pencarian data menggunakan teknik *interview* yang mendalam dan pencarian dokumen, dengan rancangan waktu penelitian menggunakan *cross sectional model*, yaitu melakukan observasi pada satu titik tertentu saja dan meliputi beberapa variabel. Penelitian *cross sectional* dipilih karena penelitian ini hanya mengobservasi fenomena pada satu titik tertentu dan bersifat eksploratif deskriptif, serta mampu menjelaskan hubungan satu variabel dengan variabel lainnya pada populasi yang diteliti (Nurdini, 2006).

Banda Aceh adalah salah satu kota yang paling parah terkena dampak bencana Tsunami 2004 dan bencana ini menjadi salah satu bencana paling besar sepanjang abad 21. Bencana di Aceh ini membuat kehilangan jiwa manusia hingga 170.000 jiwa sementara ada sekitar 250.000 rumah yang hancur dan rata oleh tanah (Kenny 2010,3). Sekitar 500.000 orang menjadi tunawisma dan mengungsi (Kenny, 2010). Bencana ini juga telah merubah tatanan lanskap perkotaan di Banda Aceh dan banyak menyisakan sisa-sisa berupa puing reruntuhan, artefak dan situs yang muncul pascabencana tsunami ini, seperti monumen kapal PLTD Apung, kawasan pemakaman massal, kapal diatas rumah penduduk, museum Tsunami, kawasan Masjid yang bertahan dari hantaman tsunami dan masih banyak yang lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana persepsi masyarakat Banda Aceh melihat dan menggunakan bentuk-bentuk fisik seperti bangunan-bangunan, kawasan dan tempat-tempat baik yang lama dan baru muncul pascabencana. Penelitian ini menggunakan data dari survei online dan beberapa wawancara yang



Gambar 1. Kapal PLTD Apung yang terseret arus Tsunami sejauh 15 km dari laut ke tengah permukiman padat penduduk.

melibatkan 35 orang dari rentang usia 20 hingga 45 tahun dengan beragam status. Mayoritas responden adalah masyarakat yang sudah lama tinggal di Banda Aceh setelah tsunami namun ada beberapa responden yang merupakan mahasiswa yang sedang studi di luar Aceh. Dari data yang didapatkan setelah bencana tsunami 2004 dan disusul rekonstruksi kota, tempat-tempat bersejarah mendapat pengakuan dari masyarakat sebagai tempat familiar dan tidak berubah banyak dalam kota namun banyak tempat-tempat memorial baru yang muncul sebagai komemorasi peristiwa Tsunami. Hal ini mengindikasikan bahwa tempat-tempat bersejarah memiliki peranan signifikan membentuk keakraban tempat. Namun tidak sedikit tempat-tempat baru yang muncul dapat memicu memori negatif masyarakat akan kejadian besar 2004 silam.

Secara normatif menurut UU Cagar Budaya No. 10 Tahun 2011, peraturan mengenai pusaka di Indonesia terlalu baku dimana kriteria menjadi pusaka harus berusia minimal 50 tahun, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Lalu, jika kita menangkap realita yang ada dalam contoh kasus destruksi pascabencana yang menyisakan reruntuhan artefak, situs dan kawasan terkait usia dan masa gayanya maka apakah belum bisa ditetapkan sebagai pusaka? Masa gaya yang mana yang dapat mewakili kawasan ditetapkan sebagai pusaka? Apakah masyarakat setuju dengan bentuk-bentuk fisik saat ini dan bagaimana persepsi masyarakat dalam melihat dan memperlakukannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membuat masyarakat tergugah dan kembali mengingat betapa pentingnya tempat-tempat tersebut untuk dilestarikan dengan cara difungsikan kembali dengan berbagai kegiatan, digunakan untuk kepentingan publik dan pembelajaran sosial bagi masa mendatang.

Metode Analisis Data

Pengelolaan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif, melalui proses yang saling terkait yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Data mentah berupa data yang dikumpulkan berkaitan dengan fenomena yang diamati. Data tersebut

dikumpulkan dalam suatu bentuk dokumentasi yang terbagi sebagai dua koleksi yang terpisah, yaitu yang bersumber dari bukti (data primer), dan yang bersumber dari laporan misalnya artikel, laporan atau buku/dokumen (data sekunder). Data tersebut selanjutnya disiapkan untuk dianalisis, dengan cara: data primer hasil wawancara terekam *tape recorder* kemudian ditulis dalam bentuk transkrip, dan data sekunder dibuat resumennya yang memuat hal-hal penting. Selanjutnya, penulis membaca keseluruhan data mentah tersebut.

Berikut beberapa contoh jawaban dari responden terkait persepsi publik atas nilai-nilai yang dianggap penting sebagai pusaka :

“nilai religi sangat penting dalam mengenang musibah ini sebagai teguran dari yang Maha kuasa, responden A”

“nilai memori yang menyedihkan ketika melihat kuburan massal terkenang keluarga yang hilang, responden B”

“nilai pembelajaran dan kesadaran akan mitigasi bencana agar lebih siap dalam menghadapi bencana , responden C”

Hasil dan Pembahasan

Masyarakat sangat sadar bahwa tempat-tempat mereka, tradisi, gaya hidup, kebiasaan, norma telah berubah dan sebagian menghilang melalui perubahan signifikan pada aspek fisik dan simbolik pascabencana tsunami. Demikian juga dengan mengidentifikasi nilai simbolik yang ditambahkan dari banyak perubahan dan rekonstruksi yang telah terjadi pascatsunami. Hal yang muncul saat orang membicarakan situs pusaka adalah bahwa perubahan sejarah dianggap sebagai bagian dari situs/kawasan pusaka. Indikator paling penting dari autentisitas bukanlah material seperti pemahaman dunia barat tetapi lebih kepada pengalaman, memori yang diingat oleh masyarakat, aktivitas dan *sense of place* yang dibicarakan orang. Sehingga selain aspek fisik yang menjadi pemicu maka muncullah pengetahuan dalam nilai-nilai tak kasat mata yang justru menjadi aspek yang lebih penting dalam membangun kesadaran mengurangi risiko bencana dan menghadapi bencana sewaktu-waktu, sebagai pembelajaran sosial diturunkan kepada masa mendatang

dan nilai spiritual yang membuat masyarakat lebih mendekati diri pada Tuhan. Dari persepsi masyarakat yang didapatkan melalui penelitian ini, saya menyatakan bahwa persepsi masyarakat mengenai nilai-nilai tradisional pemahaman yang didominasi dunia barat tidak begitu tepat dalam konteks ini dan berbeda dengan pertimbangan para ahli. Walaupun bentuk-bentuk fisik yang ada telah berubah autentisitasnya namun masih terdapat fungsi-fungsi terkait nilai-nilai dalam masyarakat yang terus dijalankan demi keberlanjutan kota.

Argumen yang peneliti bangun disini adalah pemikiran komponen nilai-nilai pusaka terutama nilai memori dalam membangkitkan nilai-nilai dalam masyarakat yang memperlakukan pusaka sebagai sebuah proses mengingat dan mengubah gaya hidup menjadi lebih baik lagi serta menanggapi perubahan struktur kota sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses sosial dan budaya ini. Baik benda teraga (*tangible*) dan benda tidak teraga (*intangible*) tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam membentuk pusaka. Bagaimanapun bentuk-bentuk fisik sebagai visualisasi dapat membangkitkan memori dan persepsi orang yang melihat dan berada didekat objek atau kawasan tersebut. Begitu pula nilai-nilai *intangible* yang melekat pada bentuk-bentuk fisik tersebut harus diidentifikasi sebagai dasar dalam menetapkan pusaka apakah bentuk fisik tersebut hanya untuk dilihat saja atau dapat difungsikan.

Penetapan kawasan rawan bencana atau pengaturan dalam peraturan zonasi (misalnya) sebuah kawasan yang ditetapkan sebagai pusaka tidak menjamin akan lestari seperti kasus kawasan rawan bencana di Banda Aceh yang pernah dilanda tsunami tahun 2004 huniannya kembali dibangun sejajar pantai dimana pemerintah tidak belajar dari bencana yang pernah terjadi dengan membangun di zona yang sama, padahal begitu banyak nilai-nilai berharga akan jejak, tempat dan objek penting yang dapat ditetapkan sebagai kawasan pusaka. Aset-aset berharga kota yang seharusnya dijaga dan dilestarikan sebagai pembelajaran sosial justru hilang dan mungkin saja dilupakan. Kawasan pusaka perkotaan yang seharusnya menjadi bagian dari kawasan lindung menjadi terpinggirkan karena aspek tata ruang yang diabaikan. Sehingga penekanannya adalah seperti apa melestarikan nilai-nilai yang melekat pada suatu tempat menjadi berharga dianggap pusaka dalam persepsi publik dengan melihat aspek memori pada suatu tempat.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, pemahaman akan pendekatan berbasis nilai sangat berpengaruh pada perencanaan tata ruang khususnya pada perencanaan tata guna lahan dan implikasi kebijakannya dalam konteks kawasan pascabencana. Dengan menggunakan pendekatan berbasis nilai seharusnya dapat menentukan kemampuan mereka untuk menghasilkan pembuatan keputusan yang lebih baik dan memberi kontribusi keluaran yang lebih baik untuk perencanaan pusaka (Jameson, 2008; Mason, 2008; Worthing and Bond, 2007; Gibson dan Pendlebury, 2009). Kegunaan dan implikasi dari pendekatan berbasis nilai yang digunakan dapat diaplikasikan pada beragam aset

pusaka perkotaan dan lingkungan binaan mulai dari struktur bangunan hingga kawasan bersejarah dengan skala penerapannya mencakup dari tingkat sub regional, regional bahkan nasional (Worthing and Bond, 2007). Fleksibilitas ruang lingkup juga berlaku untuk berbagai aspek proses manajemen, baik yang melibatkan masalah penetapan dan interpretasi atau mungkin ketika berurusan dengan Undang-undang Cagar Budaya, UU penataan ruang termasuk perencanaan tata guna lahan, diantara sejumlah perkembangan lainnya, kebijakan dan aktivitas membuat keputusan. Perencanaan tata ruang kota harus dilakukan dengan komprehensif dengan pertimbangan nilai-nilai signifikan yang saling terintegrasi terbentuk di dalam lanskap demi keberlanjutan. Kasus di Banda Aceh menunjukkan ada pengetahuan-pengetahuan baru yang muncul akibat bencana tsunami dimana sisa-sisa peninggalan bencana tersebut menjadi pengingat, komemorasi dan kesadaran penuh untuk membangun kembali kota, upaya pengurangan bencana dengan perubahan tatanan lanskap seperti hutan bakau yang ditanam kembali oleh warga bersama pemerintah, pengetahuan jalur evakuasi menyelamatkan diri jika terdapat tanda-tanda alam akan terjadinya bencana serta pemanfaatan bangunan-bangunan yang terkena dampak tsunami sebagai wadah diskusi dan pertemuan antar warga.

Daftar Pustaka

- Ashworth, G. & J. E. Tunbridge. (1994). *The Tourist-Historic City*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Ashworth, G. (1991). *Heritage Planning: Conservation as the Management of Urban Change*. Groningen: Geo Pers.
- Avrami, E., R. Mason & M. de la Torre. (2000). *Values and Heritage Conservation*. Research Report. Los Angeles: The Getty Conservation Institute.
- De la torre, m. and mason, r. (2002), 'Introduction', in M. de la Torre (ed.), *Assessing the Values of Cultural Heritage*, Los Angeles, The Getty Conservation Institute, 3-4.
- Friedmann, J. (1987). *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*. Princeton NJ: Princeton University Press.
- Fredholm, S. (2017). Assets in the age of tourism : The development of heritage planning in Ghanaian Policy. *Journal of Contemporary African Studies*, 34
- Graham, B., G. J. Ashworth, & J. E. Tunbridge. (2004). *A Geography of Heritage: Power, Culture and Economy*. London: Arnold.
- Gibson, L dan Pendlebury, J. (2009), *Introduction : valuing historic environments*, in Gibson, L and Pendlebury, J. (Eds), *Valuing Historic Environments*, Ashgate Publishing, Surrey and Burlington, VT, pp.1-16.
- Healey, P. (1997). *Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies*. London, MacMillan
- Healey, p. (2003), 'Collaborative Planning in Perspective', *Planning Theory*, 2, 101-23.
- Hobson, E., (2004). *Conservation and planning: changing values in policy and practice*. London: Spon Press
- Jameson, j. h. (2008), 'Presenting Archaeology to the Public, Then and Now: An Introduction', in G. Fairclough, R. Harrison, J. H. Jameson, Jr. and J. Schofield (eds), *The Heritage Reader*, London and New York, Routledge, 427-56.
- Kaiser, Godschalk dan Chapin (1995). *Urban Land Use Planning*, 4th Edition, University of Illinois Press.
- Kenny, S. (2010); *Reconstruction through Participatory Practice?* In M. Clarke, I. Fanany dan Kenny (Eds.), Post-

- Disaster Reconstruction: Lessons Learn from Aceh. London: Earthscan, Ltd.
- Mason, R. (2008): "Theoretical and Practical Arguments for Values-centered Preservation." *CRM: The Journal of Heritage Stewardship*, **3 (2)**, 21–48.
- Miles, Malcolm. (2007). *Cities and cultures*. Routledge critical introductions to urbanism and the city. London; New York: Routledge.
- Nurdini, A. (2006): "Cross-Sectional VS Longitudinal": Pilihan Rancangan Waktu dalam Penelitian Perumahan Permukiman. *Dimensi Teknik Arsitektur*, **34 (No.1)**, 52–58.
- Taylor, N. (1998). *Urban Planning theory since 1945*, Sage Publication, London.
- Sudikno, A. (2004). Pendekatan sejarah dan konservasi perkotaan sebagai dasar penataan kota, *Jurnal PWK ITN*, 98-112.
- Worthing, d. and bond, s. (2007), *Managing Built Heritage: The Role of Cultural Significance*, London, Wiley-Blackwell.
- Artikel Kompas, 2012. Benahi tata ruang oleh Roos Akbar.